SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG
NOMOR 56 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2026
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3, dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, setiap Instansi Pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama pada Lingkungan Kerja masing-masing;

b bahwa untuk pencapaian tujuan hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng, maka perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2026 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng.

https://jdih.kpu.go.id/sulsel/soppeng/kepsekkpu

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

https://jdih.kpu.go.id/sulsel/soppeng/kepsekkpu

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);.

https://jdih.kpu.go.id/sulsel/soppeng/kepsekkpu

10. Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1188);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2026 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2026 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis Instansi Pemerintah yang digunakan sebagai dasar dalam menyusun :

a. Rencana Kinerja Tahunan;
b. Rencana Kinerja dan Anggaran;
c. Perjanjian Kinerja;
d. Laporan Kinerja; dan
e. Melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Watansoppeng
Pada tanggal 30 September 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG

ttd.

FITRIANA ARAS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG
Plt. Kepala Subbagian
Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

Darmawati

https://jdih.kpu.go.id/sulsel/soppeng/kepsekkpu

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 56 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2026 SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2026
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	DEFENISI	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Terlaksananya penguatan KPU sesuai dengan kaidah yang berlaku	Jumlah Rancangan Keputusan KPU Soppeng yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat keputusan KPU Soppeng yang disusun dan sesuai dengan kerangka regulasi KPU	$\frac{\text{Jumlah keputusan KPU Kab. Soppeng yang disusun dan sesuai dengan kerangka regulasi KPU}}{\text{Jumlah total keputusan KPU Kab. Soppeng}} x\ 100\%$	Dokumen Surat Keputusan pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
		Persentase penyajian informasi produk hukum secara tepat, cepat dan akurat	KPU Kabupaten Soppeng yang menyajikan informasi produk hukum KPU kepada publik melalui media resmi (website, JDIH, atau media informasi resmi lainnya), yang memuat produk	$\frac{\text{Jumlah penyajian informasi produk hukum yang memenuhi kriteria tepat, cepat, dan akurat}}{\text{Total penyajian informasi produk hukum yang dinilai}} x\ 100\%$	Laporan Pengelolaan JDIH pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

https://jdih.kpu.go.id/sulsel/soppeng/kepsekkpu

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	DEFENISI	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
			hukum KPU yang relevan dan berlaku, dipublikasikan tepat waktu sesuai ketentuan, disajikan secara akurat dan tidak menimbulkan kesalahan penafsiran		
2	Terlaksananya hubungan antar lembaga dengan baik	Persentase fasilitasi kerja sama yang terjalin dalam mendukung penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan	Pengukuran dalam satuan nominal untuk melihat banyaknya dokumen pelaksanaan fasililitasi KPU Soppeng dalam hal kehumasan	$\frac{Jumlah\ Laporan\ Fasilitasi\ Pelaksanaan\ Kegiatan\ Bakohumas\ per\ triwulan}{Jumlah\ triwulan} x\ 100\%$	Laporan Bakohumas pada Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM
	Tersedianya layanan informasi dan data kepada publik yang cepat, akurat dan tepat	Persentase permohonan informasi dan data yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Persentase permohonan informasi dan data publik yang diterima dan ditangani oleh PPID KPU Kabupaten Soppeng yang diproses sesuai standar operasional layanan PPID	$\frac{Jumlah\ tindaklanjut\ permohonan\ informasi\ melalui\ PPID\ sesuai\ dengan\ SOP}{Jumlah\ total\ permohonan\ informasi\ melalui\ PPID} x\ 100\%$	Laporan PPID pada Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM
	Terlaksananya sosialisasi pendidikan pemilih kepada masyarakat dalam	Persentase pelaksanaan sosialisasi pendidikan Pemilih melalui media yang	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat jumlah kegiatan sosialisasi yang telah dilaksanakan melalui media yang tersedia terhadap total	$\frac{Jumlah\ kegiatan\ sosialisasi\ yang\ terlaksana\ melalui\ media}{Jumlah\ rencana\ kegiatan\ sosialisasi} x\ 100\%$	Laporan sosialisasi pendidikan Pemilih pada Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM

https://jdih.kpu.go.id/sulsel/soppeng/kepsekkpu

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	DEFENISI	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
	penyelenggaran Pemilu dan Pemilihan	tersedia	rencana kegiatan sosialisasi yang ditetapkan		
3	Terlaksananya tahapan pencalonan, kampanye, pemungutan suara dan penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan suara sesuai dengan jadwal tahapan yang ditetapkan KPU	Persentase terfasilitasinya layanan administrasi Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Soppeng secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat kesigapan dan kemampuan KPU Soppeng dalam menyelesaikan proses PAW anggota DPRD di tingkat Kabupaten Soppeng dalam waktu 5 hari kerja	$\frac{\text{Proses PAW Anggota DPRD Soppeng yang dapat selesai dalam 5 hari kerja}}{\text{Jumlah total proses PAW Anggota DPRD Kabupaten Soppeng}} \times 1$	Laporan pelaksanaan PAW pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
4	Terlaksananya fasilitasi pendidikan pemilih pemula, kelompok rentan dan marginal	Jumlah kegiatan Pendidikan Pemilih yang dilakukan	Jumlah pelaksanaan kegiatan pendidikan pemilih bagi pemilih pemula, kelompok rentan dan marginal dengan kriteria : 1. kegiatan memuat materi pendidikan pemilih sesuai pedoman KPU; 2. dilaksanakan pada	$\frac{\text{Jumlah kegiatan pendidikan pemilih yang telah dilaksanakan}}{\text{Total kegiatan pendidikan pemilih yang direncanakan}} \times 100\%$	Laporan kegiatan sosialisasi pada Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM

https://jdih.kpu.go.id/sulsel/soppeng/kepsekkpu

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	DEFENISI	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
			tahun berjalan; 3. menggunakan metode dan media yang tersedia; 4. dibuktikan dengan laporan dan dokumentasi kegiatan;		
		Jumlah pemilih pemula, kelompok rentan, dan marginal yang diberikan Pendidikan Pemilih	Jumlah pemilih pemula, kelompok rentan, dan marjinal di wilayah kabupaten Soppeng yang memperoleh pendidikan pemilih melalui tatap muka, media, atau komunitas, terdata dan terdokumentasi, dilaksanakan sesuai ketentuan dan pedoman pendidikan pemilih	$\frac{\textit{Jumlah individu dari kategori pemilih pemula, kelompok rentan dan marginal yang tercata mengikuti kegiatan pendidikan pemilih}}{\textit{Jumlah total target individu yang direncanakan}} x\ 100\%$	Laporan kegiatan sosialisasi pada Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM
5	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan di KPU Kabupaten Soppeng	Persentase penyelesaian Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran sesuai ketentuan yang berlaku	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat banyaknya penyelesaian pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan	$\frac{\textit{Jumlah penyelesaian laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan}}{\textit{Jumlah total laporan pertanggungjawaban}} x\ 100\%$	LPJ Keuangan berupa BKU dan Buku Pembantu pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik

https://jdih.kpu.go.id/sulsel/soppeng/kepsekkpu

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	DEFENISI	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan dengan baik	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan KPU Kabupaten Soppeng yang disusun berdasarkan transaksi keuangan pada tahun berjalan, menggunakan sistem akuntansi pemerintah yang berlaku, disampaikan tepat waktu dan sesuai format yang ditetapkan	*jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan KPU Kabupaten Soppeng yang disusun dan disampaikan tepat waktu serta sesuai ketentuan pada periode berjalan*	Laporan keuangan pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
		Jumlah laporan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)	Jumlah laporan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) yang disusun oleh KPU Kabupaten Soppeng sesuai pedoman PIPK dan standar akuntansi disampaikan tepat waktu kepada KPU Provinsi/KPU RI dalam satu tahun anggaran.	*Jumlah laporan Penilaian Implementasi Pengendalian Keuangan (PIPK) KPU Kabupaten Soppeng yang disusun dan disampaikan sesuai ketentuan pada periode berjalan*	Laporan PPIPK pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran dengan	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang disampaikan oleh	$\frac{Jumlah\ laporan\ yang\ disampaikan\ tepat\ waktu}{Total\ laporan\ yang\ wajib\ disampaikan} x\ 100\%$	Laporan pertanggungjawaban yang telah divalidasi KPPN pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik

https://jdih.kpu.go.id/sulsel/soppeng/kepsekkpu

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	DEFENISI	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		Tepat Waktu	unit kerja kepada pihak yang berwenang sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan		
	Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan yang tepat waktu	Persentase penyelesaian pembayaran gaji dan tunjangan pegawai secara tepat waktu	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan pegawai yang diselesaikan dan disalurkan kepada pegawai sesuai dengan jadwal atau batas waktu yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku	$\frac{\text{Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan yang tepat waktu}}{\text{Total kewajiban pembayaran gaji dan tunjangan}} x\ 100\%$	Daftar Pembayaran Gaji, Uang Makan dan Tunjangan Kinerja Pegawai pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
6	Terwujudnya perencanaan program dan anggaran yang memadai	Persentase perencanaan program dan kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat dokumen perencanaan program dan kegiatan yang disusun dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	$\frac{\text{Jumlah dokumen perencanaan yang sesuai ketentuan}}{\text{Total dokumen perencanaan yang disusun}} x\ 100\%$	Dokumen Pencermatan Belanja Pegawai, Belanja Operasional Perkantoran pada Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
	Terwujudnya penguatan kelembagaan organisasi KPU	Indeks Reformasi Birokrasi	Pengukuran dalam satuan persen (kumulatif) untuk melihat kemampuan KPU Soppeng dalam mencapai nilai minimal B untuk penilaian mandiri Reformasi Birokrasi	$\frac{\text{Jumlah komponen Reformasi Birokrasi yang dipenuhi}}{\text{Total komponen Reformasi Birokrasi yang ditetapkan dalam pedoman KPU}} x\ 100\%$	LKE Reformasi Birokrasi pada Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi

https://jdih.kpu.go.id/sulsel/soppeng/kepsekkpu

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	DEFENISI	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		Persentase pelaksanaan pelayanan publik secara baik oleh KPU Soppeng	Persentase pelaksanaan pelayanan publik di KPU Soppeng yang telah dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan, meliputi aspek prosedur, waktu pelayanan, kualitas hasil layanan, serta kepuasan masyarakat	$\frac{Jumlah\ layanan\ yang\ memenuhi\ standar\ pelayanan}{Total\ layanan\ yang\ diberikan} x\ 100\%$	Dokumen Hasil Pengisian Instrumen PEKPPP pada Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
	Terlaksanya monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran dengan baik	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi (Monev) pelaksanaan program dan anggaran KPU Kabupaten Soppeng yang disusun berdasarkan realisasi program dan anggaran pada periode pelaporan, memuat capaian, permasalahan, dan rekomendasi perbaikan, disusun sesuai pedoman yang berlaku, disampaikan tepat waktu sesuai jadwal pada tahun berjalan.	*Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran yang disusun oleh KPU Kabupaten Soppeng serta disampaikan sesuai jadwal dan ketentuan pada periode berjalan*	Laporan Monev Bulanan dari Aplikasi E-Monev Bappenas pada Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi

https://jdih.kpu.go.id/sulsel/soppeng/kepsekkpu

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	DEFENISI	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
7	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan SDM	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan administasi kepegawaian secara tepat waktu	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat banyaknya pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	$\frac{Jumlah\ pegawai\ yang\ mendapatkan\ layanan\ kepegawaian\ tepat\ waktu}{Jumlah\ total\ pegawai}\ x\ 100\%$	Data pendukung pemberian ijin, cuti, kenaikan pangkat pegawai pada Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM
	Tersedianya dokumen kepegawaian yang valid dan update	Persentase dokumen Pegawai KPU Soppeng yang disediakan secara valid dan update	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat dokumen kepegawaian pegawai KPU Soppeng yang tersedia secara lengkap, akurat (valid), dan mutakhir (update) sesuai dengan kondisi terakhir	$\frac{Jumlah\ dokumen\ pegawai\ yang\ valid\ dan\ update}{Total\ dokumen\ pegawai\ yang\ seharusnya\ tersedia}\ x\ 100\%$	Data pegawai di aplikasi SIMPEG pada Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM
8	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana kerja yang baik dan memadai	Persentase kualitas penyediaan dukungan sarana kerja yang baik dan memadai	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat banyaknya fasilitas perkantoran milik KPU Soppeng yang berfungsi dengan baik	$\frac{Jumlah\ fasilitas\ perkantoran\ yang\ berfungsi\ dengan\ baik}{Jumlah\ total\ fasilitas\ perkantoran\ pendukung\ kinerja\ satker}\ x\ 100\%$	Data kondisi fasilitas perkantoran pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
	Meningkatnya kualitas layanan perkantoran sesuai kebutuhan kerja	Persentase Kualitas Layanan Perkantoran sesuai Kebutuhan Kerja	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat banyaknya fasilitas perkantoran milik KPU Soppeng yang berfungsi	$\frac{Jumlah\ fasilitas\ perkantoran\ yang\ berfungsi\ dengan\ baik}{Jumlah\ total\ fasilitas\ perkantoran\ pendukung\ kinerja\ satker}\ x\ 100\%$	Data kondisi fasilitas perkantoran pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik

https://jdih.kpu.go.id/sulsel/soppeng/kepsekkpu

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	DEFENISI	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
			dengan baik		
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Persentase Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan Pengelolaan Arsip KPU	Pengukuran dalam satuan persentase pada satuan waktu tertentu untuk melihat banyaknya arsip yang dikelola KPU Soppeng sesuai jadwal retensi arsip (JRA)	$\frac{Jumlah\ arsip\ yang\ dikelola\ sesuai\ Jadwal\ Retensi\ Arsip}{Jumlah\ total\ Arsip} x\ 100\%$	Dokumen kearsipan pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
	Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol	Persentase Kualitas Layanann Persidangan dan Protokol	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat kesigapan KPU Soppeng menyelesaikan Hasil Notulensi/ Dokumentasi/ Rapat Pleno rutin paling lambat 2 hari kerja	$\frac{Jumlah\ hasil\ notulensi\ dan\ dokumentasi\ rapat\ pleno\ rutin\ yang\ diselesaikan\ paling\ lambat\ 2\ hari\ kerja}{Jumlah\ total\ hasil\ rapat\ pleno\ rutin} x\ 100\%$	Laporan Pleno Rutin pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban yang memberikan rasa aman dan nyaman bagi Pegawai KPU Kabupaten Soppeng	Persentase Kualitas Layanan Pemberian Keamanan dan ketertiban bagi Pegawai KPU	Persentase tingkat kualitas layanan pemberian keamanan dan ketertiban kepada pegawai KPU yang diukur berdasarkan pemenuhan standar pelayanan, tingkat kepuasan pengguna layanan, serta minimnya gangguan keamanan di	$\frac{Jumlah\ responden\ puas}{Total\ responden} x\ 100\%$	Rekapitulasi laporan Jagat Saksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik

https://jdih.kpu.go.id/sulsel/soppeng/kepsekkpu

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	DEFENISI	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
			lingkungan kerja		
9	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (clean governance)	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat banyaknya pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti KPU Soppeng	$\frac{Jumlah\ pengaduan\ yang\ ditindaklanjuti}{Jumlah\ total\ pengaduan\ masyarakat} x\ 100\%$	Laporan pengaduan masyarakat pada Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM
	Meningkatnya Hasil Pengawasan APIP KPU dalam Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Wewenang KPU	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat banyaknya penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP, dan APIP yang ditindaklanjuti KPU Soppeng	$\frac{Jumlah\ rekomendasi\ BPK, BPKP, dan\ APIP\ yang\ ditindaklanjuti}{Jumlah\ total\ rekomendasi\ BPK, BPKP, dan\ APIP} x\ 100\%$	Laporan tindaklanjut rekomendasi BPK, BPKP, dan APIP pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
	Meningkatnya Efektifitas Sistem Pengendalian Internal	Jumlah Dokumen Kertas Kerja Maturitas SPIP	Pengukuran dalam satuan nominal untuk melihat kedisiplinan dan ketaatan KPU Soppeng dalam mengisi dan menyampaikan kartu kendali SPIP secara lengkap dan tepat waktu	$\frac{Jumlah\ penyampaian\ kartu\ kendali\ SPIP\ secara\ lengkap\ dan\ tepat\ waktu}{Jumlah\ total\ kartu\ kendali\ SPIP} x\ 100\%$	Laporan SPIP pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

https://jdih.kpu.go.id/sulsel/soppeng/kepsekkpu

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	DEFENISI	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
10	Terlaksananya Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemilu dan Pemilihan	Persentase pengadaan barang dan jasa KPU Soppeng dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara	Pengukuran dalam satuan Persentase paket pengadaan barang dan jasa di KPU Soppeng yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	$\frac{Jumlah\ paket\ pengadaan\ tanpa\ kasus}{Total\ paket\ pengadan} x\ 100\%$	Dokumen dan rekap pengadaan pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara berdasarkan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP)	Pesentase kepatuhan dan ketertiban KPU Soppeng dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat ketertiban dan kepatuhan KPU Soppeng dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	$\frac{Jumlah\ barang\ milik\ negara\ yang\ dapat\ dikelola}{Jumlah\ total\ barang\ milik\ negara} x\ 100\%$	Dokumen BMN (BAR Internal, CAL BMN, Laporan Wasdal dan RKBMN dan laporan kondisi barang) pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
		Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan Simak BMN yang Datanya sesuai dengan Data Standar Akuntansi Keuangan (SAK)	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat Laporan Barang Milik Negara berdasarkan Simak BMN	$\frac{Jumlah\ laporan\ barang\ milik\ negara}{Jumlah\ total\ barang\ milik\ negara\ yang\ dikelola} x\ 100\%$	Laporan BNM pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik

https://jdih.kpu.go.id/sulsel/soppeng/kepsekkpu

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	DEFENISI	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
11	Tersedianya Data dan Informasi Pemilih yang Mutakhir	Persentase penyediaan Data dan Informasi Pemilih yang Mutakhir	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat kapabilitas, kemampuan dan kesigapan KPU Soppeng dalam memutakhirkan data pemilih secara tepat waktu	$\frac{Jumlah\ pelaksanaan\ tahapan\ pemutakhiran\ data\ pemilih}{Jumlah\ total\ Pemilu\ dan\ Pemilihan} x\ 100\%$	Dokumen pemutakhiran data pemilih pada Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
	Terwujudnya penerapan e-government secara tepat	Persentase penerapan e-government sesuai SOP yang berlaku	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat ketersediaan sarana, prasarana teknologi informasi untuk sistem informasi yang aman, handal dan lancar yang dimiliki dan dikelola KPU Soppeng	$\frac{Jumlah\ sarana\ dan\ prasarana\ TI\ untuk\ sistem\ informasi\ yang\ handal, aman\ dan\ lancar}{Jumlah\ total\ darana\ dan\ prasarana\ TI\ untuk\ sistem\ informasi} x\ 100\%$	Dokumentasi sarana dan prasarana TI pada Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
	Tersedianya Sarana dan Prasarana IT KPU yang terintegrasi dengan baik	Persentase penyediaan Sarana dan Prasarana secara memadai	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat penerapan seluruh Aplikasi oleh KPU Soppeng secara terintegrasi	$\frac{Jumlah\ aplikasi\ terintegrasi\ yang\ diterapkan}{Jumlah\ seluruh\ aplikasi\ terintegrasi} x\ 100\%$	Dokumentasi penerapan aplikasi pada Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
12	Terlaksananya Peningkatan Kompetensi SDM	Persentase peningkatan kompetensi SDM melalui Media	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat banyaknya Pegawai yang Telah Mengikuti	$\frac{Jumlah\ pegawai\ yang\ mengikuti\ pendidikan\ dan\ pelatihan}{Jumlah\ total\ pegawai} x\ 100\%$	Dokumen sertifikat pegawai pada Sub Bagian Partisipasi, Hubungan

https://jdih.kpu.go.id/sulsel/soppeng/kepsekkpu

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	DEFENISI	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		Kompetensi yang ada	Pendidikan dan Pelatihan		Masyarakat dan SDM
		Persentase Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Pegawai dengan Jumlah Jam Pelajaran Sesuai Aturan yang Berlaku dalam Periode Satu Tahun	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat banyaknya Pegawai yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	$\frac{Jumlah\ pegawai\ yang\ mengikuti\ pendidikan\ dan\ pelatihan}{Jumlah\ total\ pegawai} x\ 100\%$	Dokumen sertifikat pegawai pada Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM
13	Terlaksananya Persiapan Pendataan DPT Berkelanjutan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Persiapan Pendataan DPT Berkelanjutan	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat laporan yang disusun dan disampaikan oleh unit kerja terkait pelaksanaan kegiatan persiapan pendataan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Berkelanjutan	*Total laporan pelaksanaan persiapan pendataan yang disusun dan disampaikan*	Laporan Persiapan Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2026 pada Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
	Terlaksananya Fasilitasi Pendataan DPT Berkelanjutan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pendataan DPT Berkelanjutan bersama Pihak Terkait	Pengukuran dalam satuan kumulatif untuk melihat laporan yang disusun dan disampaikan oleh unit kerja terkait pelaksanaan kegiatan Pendataan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Berkelanjutan yang	*Total laporan pelaksanaan DPT Berkelanjutan bersama pihak terkait yang disusun dan disampaikan*	Laporan Triwulan Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2026 pada Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi

https://jdih.kpu.go.id/sulsel/soppeng/kepsekkpu

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	DEFENISI	CARA PERHITUNGAN	SUMBER DATA
			dilaksanakan bersama pihak terkait		

Watansoppeng, 30 September 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG,

ttd.

FITRIANA ARAS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG
Plt. Kepala Subbagian
Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

Darmawati

https://jdih.kpu.go.id/sulsel/soppeng/kepsekkpu